

BAB III

PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG

DEMOKRASI

A. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adalah tradisi bersama membahasa dan mengajukan pikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpadangan memperbaiki kehidupan.¹

Ide demokrasi Gus Dur karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukan sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Disinilah letak

¹ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h.85

permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada diluar sebagai orang mandiri.²

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Gus Dur adalah seorang yang *inkonsistensi*, sering membuat maneuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun justru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukan ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmenyan dalam menyerukan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, dan termasuk pembelaan terhadap kaum perempuan)) serta keadilan bagi setiat warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi.

Lebih lanjut, dalam rangka pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, Gus Dur tidak harus masuk dalam sistem tetapi dimanapun dan kapanpun usaha pembelaan terhadap demokrasi dan keadilan terus dilakukan. Gus Dur secara tegas menolak bergabung dengan ICMI dan memelopori berdirinya forum demokrasi (FORDEM) sekaligus menjadi ketua fordem. Gus Dur sosok yang tak mau menyerah dan

² Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, h. 199

terkesan bandel, meskipun keberadaanya di Fordem mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan para cendekiawan Muslim.³

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

Dalam konteks ke-Indonesia-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari'ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law*, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi Gus Dur menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat.⁴

³ Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: ArRuzz, 2004), h. 72.

⁴ Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 147

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan Negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan Negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.⁵

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri. pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatas namakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. dalam hal ini tokoh agama, birokrat pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, h. 115

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Gus Dur memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar kekuatan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindungan harta benda dan milik pribadi, dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa corak utama pemikiran Gus Dur lebih menekankan pada pendekatan kontekstual dan coba memadukan pemikirna khasanah pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, Gus Dur tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metedologi hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam kerangka pembentukan suatu sistem untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan aktual dimasyarakat.

Negara yang benar-benar demokrasi tentunya menyerahkan urusan di tangan rakyat dan menjung-jung tinggi hak-hak asasi manusia. Sehingga kehidupan manusia akan terasa indah dengan

⁶Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Desantara 2001), h. 180.

kemajemukannya akan tetapi dapat menghargai pendapat dan prinsip hidup masing-masing individu, perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang antara Islam dan agama-agama lain terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia, penerimaan Islam akan kerja sama itu tentunya akan diwujudkan dalam praktik kehidupan agama juga menjadi kewajiban. Kerja sama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban.⁷

Demokrasi dikatakan berhasil jikalau warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraan (egalitarianisme) warga masyarakat baik didepan undang-undang, jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi inilah yang sangat membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat.⁸

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita Semua*, Cet. I (Jakarta: Wahid Institut, 2006), h.133.

⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku, ...*, h. 86

B. Demokrasi dan Pluralisme

Pluralitas bangsa Indonesia berjalan seiring dengan demokrasi yang didalamnya terdapat nilai persamaan dan kebebasan. Dengan demokrasi, masing-masing komunitas dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta sikap dewasa dalam berbeda pendapat. Karena itu, dalam pandangan Gus Dur perlu dilakukan upaya saling memahami dalam konteks kedewasaan demokrasi, bukan sikap harus saling menyamakan atau menyeragamkan.

Demokrasi merupakan tumpuan bagi mereka yang menolak penggunaan Negara untuk kepentingan agama, sekaligus memberikan tempat untuk agama. Kalau satu masyarakat hidup dalam iklim demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan himbauan kepada orang-orang yang fanatik terhadap simbol-simbol Islam. Demokrasi justru akan menampilkan wajah Islam yang damai, tanpa kecurigaan dan kemarahan. Demokrasi gerakan Islam menghendaki agar umat Islam sendiri siap menyambutnya, dikarenakan kelemahan utama mayoritas umat Islam adalah berpikir untuk dirinya sendiri. dalam konteks in Gus Dur mengatakan: demokrasi itu harus *take and give*

tidak ada orang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan keyakinan agamanya.⁹

Kegigihan Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia dapat kita lihat ketika Gus Dur memprakarsai berdirinya forum demokrasi (FORDEM). Pada zaman sekarang ini, sebuah forum demokrasi seperti itu, tak lagi menjadi satu hal yang begitu penting dan monumental. Akan tetapi lain hal bila dibandingkan dengan konteks zamannya, yakni pada zaman Orde Baru bertahta, orang atau kelompok yang berani berbeda atau keluar dari yang dikembangkan penguasa, adalah orang atau kelompok yang benar-benar berani. Lantaran taruhnya adalah nyawa atau eksistensi diri sendiri dan ancaman terhadap diri Gus Dur, waktu itu siapapun tahu, beliau dijegal-jegal dan diburu-buru layaknya “pembanggang” Negara.¹⁰

Demokrasi, sebagaimana halnya dengan Negara, menurut Gus Dur, tidaklah pernah sempurna dan memuaskan. Kerelaan untuk menerima kenyataan ini justru membangkitkan tekad untuk selalu mengusahakan perbaikan untuk terus menerus, agar menghampiri kesempurnaan, sekaligus menjaga agar tidak menjadi kerosotan dan

⁹ Nandirotul Umah, *“Pendidikan Islam di Indonesia dalam Prespektif Gus Dur”*, (Skripsi Strata-1 Jurusan Tarbiyah IAIN Salatiga Yogyakarta), h.

¹⁰ Abd. Rahman, *“Pluralisme dan Demokrasi Pada zaman Abdurrahman Wahid”*, [http://komunitas_pecinta_sejarah.blogspot.co.id/2013/08/pluralisme dan demokrasi masa.html](http://komunitas_pecinta_sejarah.blogspot.co.id/2013/08/pluralisme_dan_demokrasi_masa.html), (diakses pada 23 maret 2018)

kemacetan, apalagi penyimpangan dan ketimpangan yang tidak perlu. Satu hal yang patut dibanggakan dari Gus Dur, nilai-nilai demokrasi yang diusungnya bukanlah demokrasi model baratataupun timur (kalau ada), melainkan demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai martabat kemanusiaan yang bersifat universal, baik itu digali dari agama-agama dari sifat, maupun dari tradisi dan budaya nusantara.¹¹

Gus Dur adalah sosok agamawan yang menerapkan teologi untuk mencapai jalan kemanusiaan tanpa memandang status sosial dan keagamaan orang lain. Hingga akhir hayatnya Gus Dur adalah sosok muslimin yang gigih memperjuangkan dan menanamkan panji-panji pluralisme dalam kehidupan di Negara Indonesia yang plural. Maka perlindungan warga setiap masyarakat harus diutamakan dalam menghadapi pergesekan-pergesekan yang kapan saja bisa terjadi.

Komitmen Gus Dur dalam menegakan nilai-nilai pluralisme di Indonesia merupakan pemaknaan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, atas dasar itulah, maka Islam sangat menentang kekerasan dan diskriminasi terhadap manusia.

Gus Dur dengan tegas mengatakan “pluralisme itu harga mati”, pluralisme itu mutlak untuk membangun Indonesia yang memiliki

¹¹ Zainal Arifin Toha, *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2003), h. 282

banyak suku bangsa dan agama, pluralisme menjadi cara pandang paling baik untuk bersikap dan bertindak. Sudah tidak bisa ditawar pluralisme harus menjadi cara pandang untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.¹²

Pluralisme yang di praktekan dan diajarka Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Gus Dur membaca, menguasai, menerapkan AL-Quran, Hadis, dan kitab-kitab kuning tidak di khususkan bagi orang Islam. Gus Dur bersedia memaknai yang manapun asal benar dan cocok hati nurani. Gus Dur tidak memperdulikan apakah kutipan dari Injil, Naghawa Gita, kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat-ayat Al-Qur'an kta pakai secara fungsional, bukannya diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar tapi aplikasi adalah soal penafsiran berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran.¹³

Keberagaman bagi Gus Dur adalah rahmatan yang telah digariskan oleh ALLAH SWT. Menolak kemajemukan sama halnya

¹² Rumadi, *Damai Bersama Gus Dur*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,2010), h. 16.

¹³ Abdurrahman Wahid, *Prisma...*,h. 204.

mengingkari pemberian Illahi. Perbedaan merupakan kodrat manusia, Gus Dur cenderung memandang perbedaan dalam perspektif *ethich of dignity* dari pada sebagai pemberian sedangkan memandang sebatas pilihan. Islam adalah agama yang melarang untuk merendahkan agama lain. Meski sebagian muslim harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tapi tidak berarti diharuskan menjauhi dan tidak berinteraksi dengan non muslim. Merendahkan non Muslim justru akan menjatuhkan bahwa Islam bukan agama yang mulia sejak senantiasa mengingatkan bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* maka, mustahil menjadi rahmat jika perlakuan Muslim tidak bijak sana terhadap non Muslim.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, suku, bahasa, keyakinan dan kaya akan agama, masyarakat telah meyakini banyak kepercayaan dan dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh dalam hidupnya yaitu kepercayaan animisme, dinamisme, agama Hindu, dan Budha. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan, dan tidak berbeda kasta sehingga Islam di Indonesia diterima dan tersebar di Nusantara.¹⁴

¹⁴ Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran...*, h. 139.

C. Demokrtisasi Pendidikan

Lembaga pendidikan di berbagai Negara termasuk Indonesia merupakan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun bersifat sentralistik: berasal dari atas bukannya dari bawah yaitu: melalui proses komunikatif dan akomodatif yang memihak rakyat. Dengan kata lain pendidikan tidak mendewasakan dan membesakan manusia dari penindasan. Demi tegaknya demokratisasi pendidikan maka campur tangan penguasa (pemerintah) harus dihindari, bukan sama sekali ditiadakan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam institusi pendidikan yaitu sebagai fasilitator. Sedangkan pada tataran praktis berkaitan dengan pelaksanaan dan penyusun materi diserahkan kepada rakyat dengan melibatkan bergabagai unsur masyarakat.¹⁵

Pendidikan merupakan sebuah proses dimana manusia menemukan eksistensi diri: proses berpikir, berpendapat dan seterusnya merubah hidupnya lebih bermakna dan beradab. Sistem sentralisasi yang selama ini dijalankan dinilai telah menyumbat daya kritis dan kreatifitas anak didik. Hal ini terlihat dalam pendidikan Agama Islam: guru sebagai “sentral” yang selalu benar, lengkap bebas kritik dari

¹⁵ Muqowin, “Shifing Paradigama Pendidikan Islam dalam masyarakat Plural”,

siswa pada posisi bawah harus sesuai dengan “atas” dengan demikian tugas pendidikan Islam adalah menumbuh kembangkan potensi peserta didik dengan daya kreatifitas yang dimilikinya.¹⁶

Dalam berdemokrasi kita harus melindungi mereka yang minoritas. Dengan demikian lingkungan pendidikan Islam harus membiasakan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam memahami agama, karena hasil apapun pemahaman manusia tentang ajaran bersifat relatif adanya. Dengan cara demikian maka akan terhadai untuk menghormati nilai-nilai pluralitas manusia.

Membiasakan anak didik untuk berpikir secara kritis, analisis, inovatif, dan kreatif: mendialogkan pengetahuan yang didapat dibangku sekolah dengan realitas empiris masyarakat. Sehingga dengan demikian akan terjadi proses perenungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan relitas sosial akan memungkinkan siswa tumbuh dengan penghormatan atas pluralitas yang unik. Dengan demikian anak didik akan terus mendialogkan pengetahuan dengan perkembangan zaman.¹⁷

Pendidikan agama sebagai upaya transformasi nilai-nilai religius yang penuh dengan moralitas dan etika kemanusiaan terjebak

¹⁶ Amin Abdullah, *Tafsir Baru Study Islam Era Multi Kultural*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta 2002), h. 352.

¹⁷ Abdullah, *Tafsir Baru Study...*, h. 370

pada formalism symbol-simbol keagamaan yang semu yaitu: rutinitas ibadah dan semua belum dapat menyentuh etika (molar) secara umum. Dengan demikian pendidikan agama belum menyentuh pada substansi dan esensi dari nilai-nilai religius yaitu dengan kesalehan sosial dengan tidak mengenyampinkan ibadah yang bersifat *ubudiyah* padahal ruh pendidikan Islam terletak pada nilai nilai religius

Tujuan Islam adalah menciptakan individu yang beradab yaitu: individu yang sadar individualitasnya dan hubungan yang tepat dengan diri, Tuhan, masyarakat dan alam sekitar baik yang tampak maupun yang gaib. Dengan kata lain seorang individu mempunyai tanggung jawab dengan tuhan atas tidaknya serta bertanggung jawab secara moral sengan masyarakat (sosial) dan dalam semesta.¹⁸

Jadi adanya upaya memadukan kesalehan persoalan dan kesalehan sosial: keselamatan insaniah, keselamatan basyariah, serta keselamatan alam. Pendidikan tidak semesta memicu kecerdasan yang bersifat kognitif sementara, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yaitu: perilaku kognitif terhadap sosial kemasyarakatan.

¹⁸ M. Naquib al Atas, *Filsafat...*, h. 189

D. Pribumisasi Islam

Islam sejak pertama kali turun yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan para sahabat tidak semerta-merta menolak semua tradisi pra-Islam (tradisi masyarakat Arab pra-Islam). Intinya budaya, tradisi dan adat setempat tidak bertentangan secara dimental dengan Islam sehingga itu menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu. Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia, tidak serta merta menghapus tradisi, budaya dan adat masyarakat setempat yaitu masyarakat Nusantara pada saat itu.¹⁹

Agama dan budaya bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam bersumberkan AL-Quran, wahyu yang bersifat normatif maka cenderung permanen. Sedangkan budaya ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.²⁰

Gus Dur mengatakan: tumpang tindih antara agama dan budaya akan terus terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memeperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang, kekayaan

¹⁹ Umarudin Masdar, *Pemikiran...*, h. 141

²⁰ Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 117

variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara agama dan budaya bukan hanya kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya karena manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegang seperti itu aka reda dengan sendirinya, sebagai contoh rendahnya semangat ulama' dan mempersoalkan rambut gondrong. Pribumisasi Islam dalam kehidupan bangsa dan Negara merupakan suatu ide yang perlu dicermati selanjutnya Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan suatu upaya menghadirkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya.

Gus Dur dengan idenya tentang pribumisasi Islam ini ingin menampilkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada relitas pluralisme kebudayaan yang ada. Gus Dur dengan tegas menolak "satu Islam" dalam eksperesi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreatifitas umat tetapi juga membuat Islam terealisasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya proses dari

Arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. kalau itu terjadi maka yang berlangsung adalah proses pelarian. Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idelistik untuk menjadi Muslim yang baik kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan substansi.²¹

Sebagai pemeluk agama Islam yang baik dalam ruang lingkup kebangsaan dan kenegaraan, yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama Islam. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama Islam dan situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka dalam bahasa lain, agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadi kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.

²¹ Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 130

Gus Dur seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh Ulama'-ulama terahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Gus Dur sangat kritis terhadap budaya tradisional.²²

Pribumisasi Islam merupakan dakwah "*amar ma'ruf nahi munkar*" diselaraskan dengan konsep "*mahabadi kairo ummah*", dengan pelaksanaan konkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Agama Islam adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku manusia atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dibutuhkan umat Islam di Indonesia hanyalah menyatukan "aspirasi Islam menjadi aspirasi nasional."²³

Islam harus memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses moderinisasi dalam hal ini agama dijadikan

²² Greg Barton, *Memahami Abdurrahman Wahid* dalam Pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKis, 1999), xxxvi

²³ Zainal A. Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*(Yogyakarta: Gama Media 2001), h. 205

tempat mencari solusi atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karena itu tokoh agama mempunyai peran penting dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan kembali umat Islam sebagai mayoritas agama terbesar di Indonesia dan non Muslim mempertimbangkan realitas kehidupan.

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan pos pertahanan untuk mempertahankan identitas Islam dari pengaruh sekulerisme. Kecenderungan setatus ini menunjukan tidak kemampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sementara ini hanya mampu menolak kemungkaran, kebatilan dan kemaksiatan, namun belum mampu menjadi solusi kebaikan dalam arti luas.

Islam yang universal telah dinyatakan dalam rangkaian ajaran Islam sendiri, seperti *fiqih*, *tauhid*, *akhlak*, dan sikap hidup Islam yang menampilkan kepedulian pada unsure kemanusiaan. Islam mengemban misi memuliakan dan mengangkat harkat martabat manusia, menegakan kebenaran, keadilan kemanusiaan, demokrasi, egaliter,

musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, saling menghormati, menghargai, melindungi memuliakan dan sebagainya.²⁴

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007), h. 3.